



**WALIKOTA BLITAR**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN WALIKOTA KOTA BLITAR

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 24 TAHUN 2016  
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, penggunaan seperangkat IKU yang digunakan pada suatu unit kerja instansi, instansi ataupun di tingkat pemerintahan daerah haruslah direview secara berkala;
- b. bahwa Riviur IKU diperlukan jika terdapat perubahan program dan kegiatan-kegiatan seiring adanya perubahan organisasi perangkat daerah, agar tetap memiliki indikator kinerja yang valid yang dapat digunakan untuk pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Blitar, maka Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2016 sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu untuk di rubah ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KOTA BLITAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 24) diubah sebagai berikut :

1. Lampiran I diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini ;
2. Lampiran II diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 3 Januari 2017  
WALIKOTA BLITAR,  
Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Kota Blitar  
Pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2017 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
ORGANISASI,



Juari  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19651204 198603 1 006



LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 10 TAHUN 2017  
TANGGAL : 3 JANUARI 2017

**PENYEMPURNAAN**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**PEMERINTAH KOTA BLITAR**

VISI : " MASYARAKAT KOTA BLITAR SEMAKIN SEJAHTERA MELALUI APBD PRO RAKYAT PADA TAHUN 2021"

- MISI :
- 1 Meningkatkan Aktualisasi Nilai-Nilai Religius dalam Kehidupan Bermasyarakat
  - 2 Meningkatkan kualitas SDM yang cerdas dan berdaya saing tinggi
  - 3 Meningkatkan kemandirian ekonomi yang berorientasi pada industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan
  - 4 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berbasis sistem pelayanan berkualitas dan partisipatif
  - 5 Meningkatkan keharmonisan sosial dengan semangat rukun agawe santoso
  - 6 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional

| NO | KINERJA UTAMA                        | INDIKATOR KINERJA UTAMA        | PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN    | PENANGGUNG JAWAB                               | SUMBER DATA                                                                  |
|----|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Meningkatnya kerukunan umat beragama | Indeks Kerukunan Umat Beragama | Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama | Bakesbangpol dan Penanggulangan Bencana Daerah | Data dari Kementerian Agama / Bakesbangpol dan Penanggulangan Bencana Daerah |

| NO | KINERJA UTAMA                                                            | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                     | PENJELASAN/FORMULASI<br>PENCIPTUNGAN                                                                                                                                                                                                                                                                          | PENANGGUNG JAWAB                                                                                                                                                                   | SUMBER DATA |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2. | Meningkatnya kualitas pendidikan dan pengetahuan masyarakat              | Indeks Pendidikan                                           | $I \text{ pendidikan} = \left( \frac{1 \text{ HLS} + 1 \text{ RLS}}{2} \right) : 2$ $\text{Harapan Lama Sekolah (1 HLS)} = (\text{HLS} - \text{HLS min}) : (\text{HLS maks} - \text{HLS min})$ $\text{Rata - Rata Lama Sekolah (1 RLS)} = (\text{RLS} - \text{RLS min}) : (\text{RLS maks} - \text{RLS min})$ | Dinas Pendidikan                                                                                                                                                                   | Data BPS    |
| 3. | Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi                                         | Persentase Pertumbuhan Ekonomi                              | $\left( \frac{\text{PDRB ADHK (Th n)} - \text{PDRB ADHK (Th n-1)}}{\text{PDRB ADHK Th n-1}} \times 100\% \right)$                                                                                                                                                                                             | - Bappeda<br>- Dinas Perdagangan dan Perindustrian<br>- Dinas Koperasi dan Usaha Mikro<br>- Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP<br>- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Data BPS    |
|    |                                                                          | Nilai PDRB perkapita ADHB (Rp. 000)                         | PDRB ADHB / jumlah penduduk                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |             |
|    |                                                                          | Nilai PDRB perkapita ADHK (Rp. 000)                         | PDRB ADHK / jumlah penduduk                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |             |
| 4. | Meningkatnya Pengembangan Industri Pariwisata Daerah dan Ekonomi Kreatif | Nilai kontribusi pariwisata terhadap PDRB (ADHB) (Rp. Juta) | Nilai kontribusi PDRB sektor Pariwisata terhadap PDRB pada tahun berkenaan                                                                                                                                                                                                                                    | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan                                                                                                                                                    | Data BPS    |
| 5. | Meningkatnya efektivitas penanggulangan kemiskinan dan kualitas          | Angka kemiskinan                                            | $\left( \frac{\text{Jumlah penduduk miskin}}{\text{Jumlah seluruh penduduk}} \times 100\% \right)$                                                                                                                                                                                                            | - Dinas Sosial                                                                                                                                                                     | Data BPS    |



| NO | KINERJA UTAMA                                                            | INDIKATOR KINERJA UTAMA                        | PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN                                                                                                                                                                                                                       | PENANGGUNG JAWAB                                                             | SUMBER DATA                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | kesejahteraan sosial masyarakat                                          | Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPPT) | Jumlah Angkatan Kerja yang belum bekerja / Jumlah Angkatan Kerja x 100%                                                                                                                                                                                 | - Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP<br>- Bagian Tata Pemerintahan | Data BPS                                                                                                       |
| 6. | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan penataan ruang | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)        | <p>Nilai IKLH = <math>(0,3 \times \text{IPPA}) + (0,3 \times \text{IPPU}) + (0,4 \times \text{ITV})</math></p> <p>IPPA : Indeks Pengendalian Pencemaran Air</p> <p>IPPU : Indeks Pengendalian Pencemaran Udara</p> <p>ITV : Indeks Tutupan Vegetasi</p> | Dinas Lingkungan Hidup                                                       | Data Indeks Pencemaran Air dan Indeks Pengendalian Pencemaran Udara                                            |
|    |                                                                          | Persentase infrastruktur dalam kondisi baik    | Rata-rata jumlah (persentase jalan dalam kondisi baik + persentase jembatan dalam kondisi baik + persentase drainase dalam kondisi baik)                                                                                                                | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                      | <p>- Laporan Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi</p> <p>- Laporan Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air</p> |
| 7. | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat                                | Indeks Kesehatan                               | $I \text{ kesehatan} = (\text{AHH} - \text{AHH min}) / (\text{AHH maks} - \text{AHH min})$                                                                                                                                                              | Dinas Kesehatan                                                              | Data BPS                                                                                                       |
| 8. | Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman yang sehat dan layak      | Persentase rumah layak huni                    | $(\text{Jumlah rumah layak huni} / \text{jumlah rumah}) \times 100\%$                                                                                                                                                                                   | Dinas Perumahan Rakyat                                                       | <p>- Laporan Data Bidang Perumahan</p> <p>- Laporan Data UPTD Rusunawa</p>                                     |

| NO  | KINERJA UTAMA                                                                                           | INDIKATOR KINERJA UTAMA                       | PENJELASAN/FORMULASI<br>PENGHITUNGAN                                                              | PENANGGUNG JAWAB                                                                                                                                                                                                                               | SUMBER DATA                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 9.  | Meningkatnya tata kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram                                          | Persentase kasus kriminalitas yang tertangani | (Jumlah kasus kriminalitas yang terselesaikan / jumlah kasus kriminalitas yang dilaporkan) x 100% | - Bakesbangpol dan Penanggulangan Bencana Daerah<br>- Satpol PP                                                                                                                                                                                | Data BPS                       |
| 10. | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik | Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)              | Nilai IRB                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inspektorat</li> <li>- Bappeda</li> <li>- Sekretariat Daerah</li> <li>- BKD</li> <li>- Diskominfo</li> <li>- BPKAD</li> <li>- Sekretariat DPRD</li> <li>- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</li> </ul> | Nilai IRB dari KemenPAN dan RB |
|     |                                                                                                         | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)        | Nilai SKM tahun berkenaan                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> <li>- Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP</li> <li>- Kecamatan</li> <li>- Bagian Tata Pemerintahan</li> </ul>                                   | Nilai hasil survey IKM/SKM     |

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



Juari  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19651204 198603 1 006

WALIKOTA BLITAR  
Ttd.  
MUH. SAMANHUDI ANWAR



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) OPD  
PEMERINTAH KOTA BLITAR

1. IKU SEKRETARIAT DAERAH

INSTANSI : SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR

TUGAS POKOK : Membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta pelayanan administrasi.

FUNGSI : 1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah ;

2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;

3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;

4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah;

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

| NO | KINERJA UTAMA/TUJUAN/<br>SASARAN STRATEGIS                                                                                                                             | INDIKATOR KINERJA<br>UTAMA                                                                        | PENJELASAN / FORMULASI<br>PENGHITUNGAN                                                                                                                                               | PENANGGUNG<br>JAWAB         | SUMBER<br>DATA                               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| 1  | Terwujudnya harmonisasi dan Sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan | Prosentase Hukum yang tidak dibatalkan baik oleh Pemerintah Provinsi maupun oleh Pemerintah Pusat | Jumlah Peraturan Perundang-undangan Daerah yang tidak dibatalkan dibagi Jumlah Peraturan Perundang-undangan Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan diatasnya x 100 % | Bagian Hukum dan Organisasi | Register Peraturan Perundang-undangan daerah |

| NO | KINERJA UTAMA/TUJUAN/<br>SASARAN STRATEGIS                                                    | INDIKATOR KINERJA<br>UTAMA                                                                          | PENJELASAN / FORMULASI<br>PENGHITUNGAN                                                                                                         | PENANGGUNG<br>JAWAB                      | SUMBER<br>DATA                                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2  | Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan                                                 | Prosentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Pemerintahan Umum                     | Jumlah rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Pemerintahan Umum dibagi jumlah seluruh rumusan kebijakan x 100%                     | Bagian Tata Pemerintahan                 | Data hasil program penerapan tata kelola pemerintahan yang baik             |
| 3  |                                                                                               | Prosentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat | Jumlah rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dibagi jumlah seluruh rumusan kebijakan x 100% | Bagian Perekonomian dan Kesra            | Data hasil program dukungan pelayanan perekonomian dan kesejahteraan rakyat |
|    |                                                                                               | Prosentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Administrasi Pembangunan              | Jumlah rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan di bidang Administrasi Pembangunan dibagi jumlah seluruh rumusan kebijakan x 100%              | Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan | Data hasil program dukungan layanan administrasi                            |
|    |                                                                                               | Nilai SAKIP SETDA                                                                                   | Hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kota Bitar                                                                                               | Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan | LHE SAKIP SKPD dari Inspektorat Kota Bitar                                  |
| 3  | Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Prosentase pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-procurement                                  | Jumlah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui e-procurement dibagi Jumlah Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan melalui SIRUP x 100 %        | Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan | Lpse.bitarkota.go.id<br>Sirup.lkpp.go.id                                    |



## **2. IKU SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

### **INSTANSI**

: SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

### **TUGAS POKOK**

: Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

### **FUNGSI**

- : 1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat – rapat DPRD;
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD
5. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Sekretariat DPRD ;
6. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
7. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketetatalaksanaan dan sarana prasarana kerja; penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
8. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
9. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
10. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
11. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
12. Penyiampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Sekretariat DPRD secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;

13. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD; dan
14. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya

| NO | KINERJA UTAMA/TUJUAN/<br>SASARAN STRATEGIS                                 | INDIKATOR KINERJA<br>UTAMA                                       | PENJELASAN / FORMULASI<br>PENGHITUNGAN                                                                                                                                                                          | PENANGGUNG<br>JAWAB                      | SUMBER<br>DATA                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| 1  | Meningkatnya fasilitasi fungsi<br>Pembentukan Peraturan daerah             | Persentase fasilitasi<br>pembahasan Peraturan Daerah             | Jumlah Propempera yang difasilitasi<br>Pembahasannya / Jumlah propempera<br>yang diadwalkan untuk dibahas x 100%                                                                                                | Bagian Hukum<br>dan Persidangan          | Hasil<br>Penetapan<br>Propempera |
| 2  | Meningkatnya fasilitasi fungsi<br>pengawasan dan anggaran                  | Persentase rekomendasi<br>DPRD yang ditindaklanjuti              | (Jumlah Rekomendasi yang<br>ditindaklanjuti / jumlah rekomendasi<br>DPRD) x 100%<br><br>Keterangan :<br>"ditindaklanjuti " : menyampaikan hasil<br>rekomendasi DPRD kepada Pihak<br>eksekutif ( Kepala Daerah ) | Bagian<br>Pengawasan dan<br>Penganggaran | Hasil<br>rekomendasi<br>DPRD     |
| 3  | Meningkatnya kepuasan<br>anggota DPRD terhadap kinerja<br>Sekretariat DPRD | Persentase kepuasan DPRD<br>terhadap kinerja<br>Sekretariat DPRD | Jumlah DPRD yang puas terhadap<br>pelayanan Sekretariat DPRD / jumlah<br>seluruh anggota DPRD x 100%                                                                                                            | Bagian Umum<br>dan Keuangan              | Hasil survey<br>kepuasan         |



3. IKU INSPEKTORAT DAERAH

INSTANSI : INSPEKTORAT DAERAH

TUGAS POKOK : Membantu walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

- FUNGSI :
- 1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - 2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - 3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan walikota;
  - 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - 5. Meonitoring dan evaluasi atas tugas pengawasan;
  - 6. Pelaksanaan administrasi inspektorat;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

| NO | KINERJA UTAMA/TUJUAN/<br>SASARAN STRATEGIS        | INDIKATOR KINERJA<br>UTAMA                                                                    | PENJELASAN / FORMULASI<br>PENGHITUNGAN                                                                                                              | PENANGGUNG<br>JAWAB | SUMBER DATA                                                                  |
|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Meningkatnya pengawasan internal yang berkualitas | Persentase OPD yang tidak mendapatkan temuan berindikasi kerugian negara/daerah yang material | $\frac{\text{Jumlah OPD yang tidak mendapatkan temuan berindikasi kerugian negara/daerah yang material}}{\text{Jumlah OPD diperiksa}} \times 100\%$ | Irban Wilayah       | LHP Regular<br>LHP ADTT<br>LAP MONEV<br>LHP EKSTERNAL<br>LHP APIP<br>LAINNYA |
|    |                                                   | Persentase kasus / pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan                               | $\frac{\text{Jumlah kasus yang dapat diselesaikan}}{\text{Jumlah kasus yang ditangani}} \times 100\%$                                               | Irban Wilayah       | LHP Kasus                                                                    |

| NO | KINERJA UTAMA/TUJUAN/<br>SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA<br>UTAMA                                        | PENJELASAN / FORMULASI<br>PENGHITUNGAN                                                                                                                | PENANGGUNG<br>JAWAB | SUMBER DATA                                                      |
|----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
|    |                                            | Persentase rekomendasi hasil audit yang selesai ditindaklanjuti   | $\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi}} \times 100\%$                                               | Irban Wilayah       | - Resume Pemantauan TLHP BPK RI<br>- Resume Pemantauan TLHP APIP |
|    |                                            | Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi  | $\frac{\text{Jumlah hasil evaluasi SPIP OPD yang menerapkan SPIP pada level terdefinisi}}{\text{Jumlah OPD yang telah menerapkan SPIP}} \times 100\%$ | Irban Wilayah       | LHE SPIP                                                         |
|    |                                            | Persentase OPD yang telah ditetapkan sebagai Zona Integritas      | $\frac{\text{Jumlah OPD yang ditetapkan sbg ZI}}{\text{Jumlah OPD yang diusulkan sbg ZI}} \times 100\%$                                               | Irban Wilayah       | Penetapan ZI oleh MENPAN RB                                      |
|    |                                            | Persentase Hasil Evaluasi SAKIP OPD dengan nilai minimal Baik (B) | $\frac{\text{Jumlah hasil evaluasi SAKIP OPD bernilai minimal B}}{\text{Jumlah OPD yang dievaluasi}} \times 100\%$                                    | Irban Wilayah       | LHE SAKIP OPD                                                    |



#### 4. IKU BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

INSTANSI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TUGAS POKOK : Membantu Walikota di bidang perencanaan serta fungsi penunjang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

FUNGSI

1. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyelenggaraan tugas perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan ;
3. Penyelenggaraan pelayanan umum pada bidang urusan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan ;
4. Pengkoordinasian penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan ;
5. Pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan data pembangunan daerah ;
6. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
7. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan ;
8. Pengkoordinasi penerapan rencana tata ruang wilayah daerah ;
9. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan ;
10. Pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas badan ;
11. Pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
12. Penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi standar pelayanan publik (SPP), standar operasional prosedur (SOP) dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di lingkup badan;

13. Perumusan pengukuran kepuasan pengguna layanan ;
14. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
15. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang urusan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan secara berkala melalui *sub domain website* pemerintah daerah;
16. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
17. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

| NO | KINERJA UTAMA/TUJUAN/<br>SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA<br>UTAMA                       | PENJELASAN / FORMULASI<br>PENGHITUNGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                | PENANGGUNG<br>JAWAB                                                                                      | SUMBER<br>DATA                                                                                    |
|----|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah | Prosentase OPD yang kualitas perencanaannya baik | OPD dengan kualitas perencanaan baik / seluruh OPD x 100%<br><br>Kondisi Baik, konsisten dan selaras dibuktikan dengan :<br>- Kesesuaian program RKPD dengan RPJMD<br>- Kesesuaian tujuan dan program Renstra OPD dengan sasaran RPJMD<br>- Kesesuaian Renja OPD dengan RKPD<br>- Kesesuaian RKA OPD dengan Renja OPD | Bidang Sosial dan Budaya<br>Evaluasi Pembangunan, Bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Dokumen RPJMD, Dokumen RKPD, Dokumen KUA-PPAS, Dokumen APBD, Dokumen Evaluasi program Pembangunan |



| NO | KINERJA UTAMA/TUJUAN/<br>SASARAN STRATEGIS                       | INDIKATOR KINERJA<br>UTAMA                                               | PENJELASAN / FORMULASI<br>PENGHITUNGAN                                                                                              | PENANGGUNG<br>JAWAB                                                                                       | SUMBER<br>DATA                            |
|----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 2  | Meningkatnya pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan daerah  | Prosentase Pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan daerah            | Jumlah dokumen perencanaan sektoral yang ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pembangunan / jumlah dokumen perencanaan sektoral x 100% | Bidang Sosial dan Budaya dan Evaluasi Pembangunan, Bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah | Dokumen Perencanaan Sektoral              |
| 3  | Meningkatnya ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan | Prosentase hasil litbang yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan pembangunan | Jumlah pengkajian dan penelitian yang ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pembangunan / jumlah pengkajian dan penelitian x 100%       | Bidang Penelitian dan Pengembangan                                                                        | Dokumen hasil penelitian dan pengembangan |

## **5. IKU BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

**INSTANSI** : BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

**TUGAS POKOK** : Melaksanakan fungsi penunjang di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah.

**FUNGSI** : 1. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan;

2. Pelaksanaan tugas dan dukungan teknis fungsi penunjang keuangan;

3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang keuangan;

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang keuangan;

5. Pelayanan dan pembinaan administrasi keuangan di lingkungan kota;

6. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Badan;

7. Pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas Badan;

8. Pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasaana kerja;

9. Penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkup badan;

10. Perumusan pengukuran kepuasan pengguna layanan;

11. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang keuangan;

12. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang keuangan secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;

13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang keuangan;

14. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.



| NO | KINERJA UTAMA/TUJUAN/<br>SASARAN STRATEGIS                    | INDIKATOR KINERJA<br>UTAMA                                                | PENJELASAN / FORMULASI<br>PENGHITUNGAN                                                                 | PENANGGUNG<br>JAWAB                                                                         | SUMBER<br>DATA                      |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1  | Meningkatnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD             | Persentase Pendapatan Pajak Terhadap PAD                                  | (Pendapatan Pajak Daerah : PAD) x 100%                                                                 | - Bidang Pendapatan dan Penetapan<br>- Bidang Penagihan, keberatan dan Pengembangan Potensi | Laporan PAD                         |
| 2  | Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib | Optimalisasi Pelayanan Pajak Daerah                                       | Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak                                              | Sekretariat                                                                                 | Wajib Pajak                         |
|    |                                                               | Persentase Perangkat Daerah yang pengelolaan keuangannya tertib           | (Jumlah Perangkat yang pengelolaan keuangannya tertib : jumlah seluruh Perangkat daerah) x 100%        | Bidang Akuntansi                                                                            | Laporan pengelolaan keuangan daerah |
|    |                                                               | Ketepatan penyusunan RAPBD Kota Bitar                                     | Tanggal penyampaian RAPBD - Tanggal Surat Edaran Kepala Daerah Perihal Pedoman Penyusunan RKA OPD/PPKD | Bidang Anggaran                                                                             | Nota Kesepakatan                    |
|    |                                                               | Persentase Perangkat Daerah yang penyerapan anggarannya di atas 90 persen | (Jumlah OPD dengan realisasi diatas 90% : Jumlah OPD di lingkungan Pemkot) x 100 %                     | Bidang Perbendaharaan                                                                       | LRA                                 |
|    |                                                               | Ketepatan penyampaian Laporan Keuangan ke BPK                             | Maksimal 31 Maret Tahun N                                                                              | Bidang Akuntansi                                                                            | Laporan Keuangan Daerah             |

## 6. IKU BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INSTANSI    | : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TUGAS POKOK | : Membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| FUNGSI      | : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan berdasarkan peraturan perundang-undangan;</li><li>2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan berdasarkan peraturan perundang-undangan;</li><li>3. Perencanaan operasional dan pelaksanaan program pengembangan dan pembinaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;</li><li>4. Perencanaan operasional dan pelaksanaan program kesejahteraan dan penghargaan pegawai;</li><li>5. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian PNS daerah sesuai peraturan perundang-undangan;</li><li>6. Penyusunan penetapan, pengusulan dan pelaksanaan pengadaan formasi PNSD kota;</li><li>7. Pelayanan dan pembinaan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di lingkungan kota;</li><li>8. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Badan;</li><li>9. Pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas Badan;</li><li>10. Pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;</li><li>11. Penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkup Badan Kepegawaian Daerah;</li></ol> |



| NO | KINERJA UTAMA/TUJUAN/<br>SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA<br>UTAMA                                         | PENJELASAN / FORMULASI<br>PENGHITUNGAN                          | PENANGGUNG<br>JAWAB | SUMBER<br>DATA                         |
|----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
|    |                                            | Ketepatan<br>penyampaian<br>pertanggungjawaban APBD<br>ke propinsi | Maksimal Minggu ke 2 Bulan Juli Tahun<br>N                      | Bidang Akuntansi    | Laporan<br>Pertanggung<br>jawaban APBD |
|    |                                            | Persentase pemberdayaan<br>aset                                    | (Jumlah aset yang digunakan : Jumlah<br>Aset Seluruhnya) X 100% | Bidang Aset         | Laporan Barang<br>Daerah               |

12. Perumusan pengukuran kepuasan pengguna layanan;
13. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kepegawaian;
14. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
15. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
16. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

| NO | KINERJA UTAMA/TUJUAN/<br>SASARAN STRATEGIS                    | INDIKATOR KINERJA<br>UTAMA                                                | PENJELASAN / FORMULASI<br>PENGHITUNGAN                                                                 | PENANGGUNG<br>JAWAB                                   | SUMBER<br>DATA                   |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1  | Meningkatnya Sistem Mutasi dan Promosi Berdasarkan Kompetensi | Prosentase ASN yang ditempatkan dan dipromosikan dengan kompetensi sesuai | Jumlah ASN yang ditempatkan dan dipromosikan sesuai kompetensi<br><div>Jumlah seluruh ASN</div> X 100% | Bidang Mutasi, Promosi dan Pengembangan Kompetensi    | Rekapitulasi Data Penempatan PNS |
| 2  | Meningkatnya Profesionalisme ASN                              | Persentase ASN yang menyusun Sasaran Kinerja Pegawai sesuai Standart      | Jumlah ASN yang menyusun SKP Sesuai Standart<br><div>Jumlah seluruh ASN</div> X 100%                   | Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Penilaian Kinerja | Dokumen SKP Terevaluasi          |



## **7. IKU BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**INSTANSI** : BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**TUGAS POKOK** : Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Penanggulangan Bencana Daerah

**FUNGSI** : 1. Perumusan Kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana berdasar

- Peraturan Perundang Undangan ;
2. Penyelenggaraan urusan Pemerintah dan pelayanan Umum pada bidang Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Penanggulangan Bencana ;
3. Pengkoordinasian penyelenggaraan Kesatuan Bangsa Dalam Negeri dan Penanggulangan Bencana ;
4. Penyelenggaraan tugas kesatuan bangsa . Politik Dalam Negeri serta Bina Penanggulangan Bencana ;
5. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang Kesatuan Bangsa , Politik Dalam Negeri serta Bina Penanggulangan Bencana ;
6. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri serta Bina Penanggulangan Bencana ;
7. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian , pengelolaan anggaran dan pelaksana Tugas Badan ;
8. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan Kantor Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan PBD ;
9. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Tugas dan Kinerja Badan ;
10. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

| NO | KINERJA UTAMA/TUJUAN/<br>SASARAN STRATEGIS                                          | INDIKATOR KINERJA<br>UTAMA                                  | PENJELASAN / FORMULASI<br>PENGHITUNGAN                                    | PENANGGUNG<br>JAWAB           | SUMBER<br>DATA                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| 1  | Meningkatnya Komunikasi dan Silaturahmi Antar Umat Beragama                         | Persentase Kejadian SARA yang Tertangani                    | Jumlah Kejadian SARA yang Tertangani dibagi jumlah Kejadian SARA x 100%   | Bidang Kesbang                | Data Kelurahan, Kecamatan, dan Kepolisian   |
| 2  | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat untuk Menciptakan Kondisi yang Aman dan Tentram | Persentase Konflik Sosial yang Tertangani                   | Jumlah Konflik Sosial yang Tertangani dibagi Jumlah Konflik Sosial x 100% | Bidang Ketahanan Daerah       | Data Kelurahan, Kecamatan, dan Kepolisian   |
| 3  | Meningkatnya Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana                        | Persentase Kelurahan Tangguh Bencana                        | Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana dibagi Jumlah Kelurahan x 100%           | Bidang Penanggulangan Bencana | Data Kelurahan dan Kecamatan                |
| 4  | Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Partai Politik                 | Persentase Organisasi dan Organisasi Politik yang terdaftar | Jumlah Orkemas yang terdaftar dibagi Jumlah Orkesmas x 100%               | Bidang Hubungan Antar Lembaga | Data Ormas, LSM, Yayasan dan Partai Politik |



## 8. IKU DINAS PENDIDIKAN

INSTANSI : DINAS PENDIDIKAN

TUGAS POKOK : Membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan

### FUNGSI

1. Perumusan kebijakan di bidang pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan pelayanan umum di bidang pendidikan ;
3. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan ;
4. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang pendidikan ;
5. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas ;
6. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan, dan pelaksanaan tugas dinas ;
7. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja ;
8. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor ;
9. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan sesuai kewenangan Daerah ;
10. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Produk (SOP) ;
11. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ;
12. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan atau pelaksanaan pengumpul pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan ;
13. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pendidikan ;
14. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan pendidikan secara berkala melalui

15. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang pendidikan;
16. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

| NO | KINERJA UTAMA/TUJUAN/<br>SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA<br>UTAMA              | PENJELASAN / FORMULASI<br>PENGHITUNGAN                                                                                     | PENANGGUNG<br>JAWAB | SUMBER<br>DATA    |
|----|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1  | Meningkatnya kualitas pendidikan           | Angka Rata-rata Lama Sekolah            | Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal, dengan cakupan penduduk usia 25 tahun ke atas | Dinas Pendidikan    | Data BPS          |
|    |                                            | Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A   | Jumlah siswa usia 7-12 tahun di jenjang SD/MI/SDLB/Paket A dibagi Jumlah penduduk usia 7-12 tahun x 100%                   | Dinas Pendidikan    | Profil Pendidikan |
|    |                                            | Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B | Jumlah siswa usia 13-15 tahun di jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B dibagi Jumlah penduduk usia 13-15 tahun x 100%              | Dinas Pendidikan    | Profil Pendidikan |



## 9. IKU DINAS KESEHATAN

INSTANSI : DINAS KESEHATAN

TUGAS POKOK : Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan

### FUNGSI

1. perumusan kebijakan di bidang Kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan dan pelayanan umum di bidang Kesehatan;
3. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kesehatan;
4. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas;
5. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kesehatan dan pelayanan umum di bidang Kesehatan;
6. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan pelayanan umum di bidang kesehatan meliputi bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, PKRT serta sumber daya kesehatan;
7. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang kesehatan meliputi bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, PKRT serta sumber daya kesehatan;
8. penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan sesuai dengan kewenangan Daerah;
9. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
10. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
11. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
12. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kesehatan;

13. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan kesehatan secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
14. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
15. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
16. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
17. pembinaan dan pengawasan pengelolaan sumber pendapatan asli daerah;
18. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Kesehatan; dan
19. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

| NO | KINERJA UTAMA/TUJUAN/<br>SASARAN STRATEGIS      | INDIKATOR KINERJA<br>UTAMA     | PENJELASAN / FORMULASI<br>PENGHITUNGAN                                                                                      | PENANGGUNG<br>JAWAB                        | SUMBER<br>DATA                                    |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1  | Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat      | Angka Usia Harapan Hidup (AHH) | Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur                | Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan | BPS                                               |
| 2  | Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan | Indeks Kepuasan Masyarakat     | Rata-Rata IKM 3 UPTD Puskesmas Kecamatan ((Total dari nilai persepsi per unsur/Total Unsur yang terisi) x Nilai Penimbang)) | Bidang Kesehatan Masyarakat                | Laporan Bidang Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan |



| NO | KINERJA UTAMA/TUJUAN/<br>SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA<br>UTAMA                                                                                               | PENJELASAN / FORMULASI<br>PENGHITUNGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PENANGGUNG<br>JAWAB                              | SUMBER<br>DATA                                               |
|----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|    |                                            | Persentase Penanggulangan<br>Kejadian Luar Biasa (KLB)<br>Skala Kota Bitar yang<br>ditanggulangi dalam<br>waktu < 24 jam | KLB Skala Kota Bitar yang<br>ditanggulangi kurang dari 24<br>jam/ Jumlah KLB Skala Kota Bitar pada<br>tahun yang sama x 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bidang Kesehatan<br>Masyarakat                   | Laporan Bidang<br>Pencegahan dan<br>pengendalian<br>Penyakit |
|    |                                            | Persentase tatanan Rumah<br>Tangga sehat                                                                                 | (Jumlah rumah tangga yang memenuhi<br>kriteria rumah tangga sehat berdasar<br>penilaian 10 indikator tatanan rumah<br>tangga sehat; persalinan ditolong oleh<br>tenaga kesehatan, Memberi bayi ASI<br>eksklusif, Menimbang bayi dan Balita<br>setiap bulan, mencuci tangan dengan air<br>bersih dan sabun, menggunakan air<br>bersih, menggunakan jamban sehat,<br>memerantas jentik di rumah, makan<br>buah dan sayur setiap hari, melakukan<br>aktivitas fisik setiap hari, tidak merokok<br>didalam rumah) / (Jumlah seluruh<br>rumah tangga yang diperiksa pada<br>tahun yang sama) x 100% | Bidang Pelayanan<br>dan Sumber Daya<br>Kesehatan | Laporan Bidang<br>Kesehatan<br>Masyarakat                    |

## 10. IKU DINAS SOSIAL

INSTANSI : DINAS SOSIAL

TUGAS POKOK : Membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

### FUNGSI

1. perumusan kebijakan di bidang sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
2. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial;
3. penyelenggaraan urusan administrasi bidang sosial serta pelayanan umum di bidang sosial;
4. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang sosial;
5. penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial sesuai dengan kewenangan Daerah;
6. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
7. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
8. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
9. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang sosial;
10. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang sosial secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
11. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang sosial; dan
12. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.



| NO | KINERJA UTAMA/TUJUAN/<br>SASARAN STRATEGIS              | INDIKATOR KINERJA<br>UTAMA                                                                                                                          | PENJELASAN / FORMULASI<br>PENGHITUNGAN                                                                                                                                | PENANGGUNG<br>JAWAB                      | SUMBER<br>DATA                |
|----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| 1  | Meningkatnya Pemerataan dan Kesejahteraan PMKS          | Persentase Penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Masyarakat (PMKS)                                                                             | $\frac{(N-1) - N}{N - 1} \times 100\%$ <p><b>Keterangan :</b><br/> N : Jumlah PMKS<br/> N - 1 : Jumlah PMKS Tahun kemarin</p>                                         | Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial   | Monev/ Laporan Hasil Kegiatan |
| 2  | Meningkatnya kualitas pelayanan bagi PMKS               | Persentase (%) PMKS (yang terdiri dari Lansia, Fakir Miskin, Anak Bermasalah Sosial, Orang Terlantar) yang memperoleh Pelayanan Rehabilitasi sosial | $\frac{\text{Jumlah PMKS yang sudah dilayani}}{\text{Jumlah PMKS}} \times 100\%$                                                                                      | Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial | Monev/ Laporan Hasil Kegiatan |
| 3  | Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Sosial | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial                              | $\frac{\text{Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan sosial ( PSKS ) yang dibina dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial}}{\text{Jumlah PSKS}} \times 100\%$ | Bidang Pemberdayaan Sosial               | Monev/ Laporan Hasil Kegiatan |

## 11. IKU DINAS PERHUBUNGAN

INSTANSI : DINAS PERHUBUNGAN

TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

### FUNGSI

1. Perumusan kebijakan di bidang Perhubungan berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
2. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perhubungan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
4. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang Perhubungan;
5. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas ;
6. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
7. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja ;
8. Penyelenggaraan keamanan kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
9. Penyelenggaraan Standart Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perhubungan sesuai dengan kewenangan Daerah;
10. Penyusunan dan pelaksanaan Standart Pelayanan Publik (SPP) dan Standart Operasional Prosedur (SOP) ;
11. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
12. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan ;
13. Pengelolaan Pengaduan masyarakat di bidang perhubungan ;
14. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang Perhubungan secara berkala melalui sub domain webste Pemerintah Daerah ;
15. Pelaksanaan peningkatan pendapatan asli Daerah;



16. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Perhubungan; dan
17. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

| NO | KINERJA UTAMA/TUJUAN/<br>SASARAN STRATEGIS                                     | INDIKATOR KINERJA<br>UTAMA                                             | PENJELASAN / FORMULASI<br>PENGHITUNGAN                                                                                                        | PENANGGUNG<br>JAWAB                | SUMBER<br>DATA                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1  | Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan                         | Prosentase ruas jalan yang dilengkapi kelengkapan jalan berkeselamatan | $\frac{\text{Ruas Jalan yang dilengkapi kelengkapan jalan berkeselamatan}}{\text{Jumlah Ruas Jalan}} \times 100\%$                            | Bidang Keselamatan jalan           | Data Ruas Jalan                   |
| 2  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Sekolah dan Terminal Kargo/Barang | Load Faktor Penumpang Angkutan Sekolah Gratis                          | $\frac{\text{Jumlah Penumpang Angkutan Sekolah Gratis dalam tahun } n}{\text{Total Kapasitas Angkutan Sekolah Gratis tahun } n} \times 100\%$ | Bidang Terminal dan Angkutan Jalan | Data Angkutan Sekolah Gratis      |
|    |                                                                                | Persentase Pemanfaatan Terminal Kargo/Barang                           | $\frac{\text{(Luas Terminal Kargo/Barang yang digunakan/ Luas Total Terminal Kargo)}}{\text{100\%}} \times 100\%$                             |                                    | Data Terminal Kargo/Barang        |
| 3  | Meningkatnya penyelenggaraan lalu lintas yang tertib, aman dan lancar          | Peraihan Wahana Nugraha                                                | Predikat WTN pada tahun berkenaan                                                                                                             | Bidang Lalu Lintas                 | Penilaian Kementerian Perhubungan |

## 12. IKU DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

### INSTANSI

: DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

### TUGAS POKOK

: Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan

### FUNGSI

- : 1. perumusan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang persandian;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang persandian;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang persandian;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang persandian;
5. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
6. pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
7. pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah;
8. pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
9. layanan hubungan media;
10. penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
11. layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* & TIK Pemerintah Kota Blitar;
12. layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;
13. layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi;
14. layanan manajemen data dan informasi e-Government;
15. integrasi layanan publik dan pemerintahan;



16. layanan keamanan informasi e-Government;
17. layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah ;
18. layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Provinsi;
19. pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat;
20. penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah kabupaten/kota;
21. penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City lingkup kota;
22. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
23. pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD);
24. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
25. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
26. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
27. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
28. pengelolaan pengaduan masyarakat;
29. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
30. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; dan
31. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

| NO | KINERJA UTAMA/TUJUAN/<br>SASARAN STRATEGIS                                                                              | INDIKATOR KINERJA<br>UTAMA                                            | PENJELASAN / FORMULASI<br>PENGHITUNGAN                                                                               | PENANGGUNG<br>JAWAB                    | SUMBER<br>DATA                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1  | Meningkatnya pelayanan e-governance dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan terhadap masyarakat | Prosentase ketersediaan layanan aplikasi e-Gov pada OPD               | (Jumlah aplikasi yang tersedia / jumlah aplikasi yang dibutuhkan) x 100%                                             | Bidang Penyelenggaraan E Government    | Sumber data diolah dari Diskominfo tik Kota Bitar |
|    |                                                                                                                         | Prosentase peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik    | (Jumlah informasi pemerintah yang terakses oleh masyarakat/jumlah informasi pemerintah yang terpublikasi) x 100%     | Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | Sumber data diolah dari Diskominfo tik Kota Bitar |
|    |                                                                                                                         | Prosentase data statistik yang terlayani melalui e-governance         | (Jumlah data statistik yang terpublikasi / jumlah data statistik yang dimiliki) x 100%                               | Bidang Statistik dan Persandian        | Sumber data diolah dari Diskominfo tik Kota Bitar |
|    |                                                                                                                         | Prosentase Informasi yang pemerintah terfasilitasi keamanan informasi | (Jumlah informasi milik pemerintah atau negara yang diamankan /Jumlah informasi yang diterima dan dikirimkan) x 100% | Bidang Statistik dan Persandian        | Data informasi pemerintahan yang diarsipkan       |



### 13. IKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

#### INSTANSI

: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

#### TUGAS POKOK

: Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

#### FUNGSI

1. perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
2. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas ;
6. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
7. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
8. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
9. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
10. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
11. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
12. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

13. penyampaian data hasilpembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara berkala melalui subdomain website Pemerintah Daerah;
14. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
15. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

| NO | KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS          | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                                                                                                                                                                         | PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN                                                                                                                                                                                                                                                           | PENANGGUNG JAWAB                                                                                                         | SUMBER DATA                                                    |
|----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1  | Meningkatnya kualitas pelayanan Adminduk   | <div>           Persentase masyarakat yang puas terhadap pelayanan adminduk         </div> <div>           Persentase Rata-rata Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil         </div> | <div> <math display="block">\frac{\text{Jumlah masyarakat yang puas}}{\text{Jumlah masyarakat yang dilayani}} \times 100 \%</math> </div> <div> <math display="block">\frac{\sum \text{Persentase Kepemilikan Adminduk Capil}}{8 \text{ pelayanan Adminduk Capil}} \times 100\%</math> </div> | <div>Sekretariat</div> <div>- Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk</div> <div>- Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil</div> | <div>Hasil polling SKM</div> <div>Data base Kependudukan</div> |
| 2  | Meningkatnya data kependudukan yang akurat | <div>Persentase Peningkatan Validitas Data Kependudukan</div>                                                                                                                                                   | <div> <math display="block">\frac{\text{Data penduduk yang valid Tahun N-(N-1)}}{\text{Data penduduk yang valid Tahun N-1}} \times 100\%</math> </div>                                                                                                                                        | Bidang PLAK dan Pemanfaatan Data                                                                                         | Data base Kependudukan                                         |



#### 14. IKU DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

##### INSTANSI

: DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

##### TUGAS POKOK

: Membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Kepemudaan dan Olah Raga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan

##### FUNGSI

- : 1. Perumusan kebijakan di Bidang Kepemudaan dan Olah Raga berdasarkan perundang undangan ;
2. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Kepemudaan dan Olah Raga ;
3. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Kepemudaan dan Olah Raga ;
4. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di Bidang Kepemudaan dan Olah Raga ;
5. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas ;
6. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas ;
7. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja ;
8. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor ;
9. Penyusunan dan pelaksanaan Standart Pelayanan Publik ( SPP ) dan Standart Operasional Prosedur (SOP) ;
10. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP ) ;
11. Pelaksanaan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) dan / atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan ;
12. Pengelolaan pengaduan masyarakat di Bidang Kepemudaan dan Olah Raga ;
13. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan di Bidang Kepemudaan dan Olah Raga secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah ;
14. Pelaksanaan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) ;

15. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di Bidang Kepemudaan dan Olah Raga ;

16. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

| NO | KINERJA UTAMA/TUJUAN/<br>SASARAN STRATEGIS                       | INDIKATOR KINERJA<br>UTAMA                  | PENJELASAN / FORMULASI<br>PENGHITUNGAN                                                   | PENANGGUNG<br>JAWAB | SUMBER<br>DATA                                                                                                                                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Meningkatnya Kompetensi dan Profesionalitas Pemuda dan Olah Raga | Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif | $\frac{\text{Jumlah OKP yang aktif}}{\text{Jumlah OKP yang ada}} \times 100\%$           | Bidang Pemuda       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Pembinaan Pemuda</li> <li>- Data peserta pelatihan pemuda</li> <li>- Data anggota organisasi Kepemudaan</li> <li>- Jumlah anggota pramuka</li> </ul> |
|    |                                                                  | Persentase peningkatan prestasi olahraga    | $\frac{\text{Jumlah Atlit yang berprestasi}}{\text{Jumlah Atlit Delegasi}} \times 100\%$ | Bidang Olah Raga    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data pengiriman Atlit mengikuti kejuaraan</li> <li>- Data prestasi atlit</li> </ul>                                                                       |



## 15. IKU DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

### INSTANSI

: DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

### TUGAS POKOK

: Membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

### FUNGSI

1. Perumusan kebijakan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
2. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pariwisata dan Kebudayaan ;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan Kebudayaan dan pelayanan umum di bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
4. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
5. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas ;
6. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
7. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
8. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
9. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
10. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
11. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
12. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
13. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang Pariwisata dan Kebudayaan secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;

14. Pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah;

15. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang Pariwisata dan Kebudayaan; dan

16. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

| NO | KINERJA UTAMA/TUJUAN/<br>SASARAN STRATEGIS                                                                         | INDIKATOR KINERJA<br>UTAMA                                                                                                                                                        | PENJELASAN / FORMULASI<br>PENGHITUNGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PENANGGUNG<br>JAWAB                                                                                                                                       | SUMBER<br>DATA                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Meningkatnya kontribusi sektor jasa dan pariwisata                                                                 | 1. Persentase peningkatan nilai PDRB sektor hotel dan restoran<br><br>2. Persentase peningkatan jumlah wisatawan<br><br>3. Persentase peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif Unggulan | Nilai PDRB Sektor Hotel dan Restoran tahun n - Nilai PDRB Sektor Hotel dan Restoran tahun (n - 1) / Nilai PDRB Sektor Hotel dan Restoran tahun (n - 1) x 100%<br><br>Jumlah wisatawan tahun n - tahun dasar / jumlah wisatawan tahun dasar x 100%<br><br>(Jumlah pelaku ekonomi kreatif tahun ini - Jumlah pelaku ekonomi kreatif tahun dasar ) / Jumlah pelaku ekonomi kreatif tahun dasar ) x 100% | Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif<br><br>Bidang Kawasan Wisata<br><br>Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Data usaha jasa pariwisata<br><br>Data kunjungan wisatawan<br><br>Data Pelaku usaha Ekonomi Kreatif |
| 2  | Menguatnya budaya dan tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan kearifan lokal yang berwawasan kebangsaan | Prosentase warisan budaya yang dilestarikan                                                                                                                                       | Jumlah warisan budaya yang dilestarikan / Jumlah warisan budaya x 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bidang Kebudayaan                                                                                                                                         | - Data kelompok/grup kesenian<br>- Data ragam budaya                                                |



## 16. IKU DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

### INSTANSI

: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

### TUGAS POKOK

: Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan

### FUNGSI

- : 1. Perumusan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang serta bidang pertanahan ;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang serta bidang pertanahan
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang serta bidang pertanahan
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan
5. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan
6. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja
7. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor.
8. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik ( SPP ) dan Standar Operasional Prosedur ( SOP )
9. Pelaksanaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD )
10. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP )
11. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan
12. Pengelolaan pengaduan masyarakat
13. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan melalui sub domain website Pemerintah Daerah

14. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanian

15. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

| NO | KINERJA UTAMA/TUJUAN/<br>SASARAN STRATEGIS                            | INDIKATOR KINERJA<br>UTAMA                                                                                | PENJELASAN / FORMULASI<br>PENGHITUNGAN                                                                                                                       | PENANGGUNG<br>JAWAB                    | SUMBER<br>DATA                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1  | Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang sesuai perencanaan tata ruang | Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang                                                                   | Rata-rata penjumlahan persentase kesesuaian setiap kawasan pada kawasan lindung dan kawasan budidaya                                                         | Bidang Tata Ruang                      | Data kawasan lindung dan kawasan budidaya |
| 2  | Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan                             | Persentase jalan dalam kondisi mantap dan berkeselamatan                                                  | Rata-rata penjumlahan persentase jalan dalam kondisi baik, jalan dengan bahu jalan, jalan dengan trotoar dan jalan dengan pelengkap jalan dalam kondisi baik | Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air  | Data jalan                                |
| 3  | Meningkatnya kualitas infrastruktur jaringan irigasi                  | Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik                                                            | (Panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik dibagi panjang total jaringan irigasi) x 100%                                                                   | Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air  | Data irigasi                              |
| 4  | Meningkatnya kualitas sarana prasarana keciptakarya                   | 1. Persentase bangunan gedung pemerintah yang sesuai standar<br>(Standar : Permen PU Nomor 45/PRT/M/2007) | ( Jumlah bangunan gedung pemerintah yang sesuai standart dibagi jumlah total bangunan gedung pemerintah ) x 100%                                             | Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi | Data bangunan gedung pemerintah           |



| NO | KINERJA UTAMA/TUJUAN/<br>SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA<br>UTAMA                                | PENJELASAN / FORMULASI<br>PENGHITUNGAN                                                     | PENANGGUNG<br>JAWAB                    | SUMBER<br>DATA                                         |
|----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|    |                                            | 2. Persentase rumah tangga yang memiliki akses air bersih | (Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih dibagi jumlah rumah tangga) x 100%     | Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi | Data akses rumah tangga yang memiliki akses air bersih |
|    |                                            | 3. Persentase rumah tangga yang memiliki akses air limbah | (Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air limbah dibagi jumlah rumah tangga) x 100%     | Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi | Data rumah tangga yang memiliki akses air limbah       |
|    |                                            | 4. Persentase saluran drainase dalam kondisi baik         | (Panjang saluran drainase dalam kondisi baik dibagi panjang total saluran drainase) x 100% | Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi | Data saluran drainase                                  |
|    |                                            |                                                           |                                                                                            |                                        |                                                        |

## 17. IKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT

### INSTANSI

: DINAS PERUMAHAN RAKYAT

**TUGAS POKOK** : Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan

### FUNGSI

- : 1. Perumusan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum;
6. Pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
7. Pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman
8. Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
9. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan dan kehumasan;
10. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
11. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
12. Penyelenggaraan SPM di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai dengan kewenangan daerah;
13. Penyusunan dan pelaksanaan SPP dan SOP;
14. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;



15. Pelaksanaan pengukuran IKM dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
16. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
17. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan dinas perumahan rakyat secara berkala melalui sub domain website pemerintah daerah;
18. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dinas perumahan rakyat;
19. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

| NO | KINERJA UTAMA/TUJUAN/<br>SASARAN STRATEGIS              | INDIKATOR KINERJA<br>UTAMA                            | PENJELASAN / FORMULASI<br>PENGHITUNGAN                                              | PENANGGUNG<br>JAWAB          | SUMBER<br>DATA                                        |
|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1  | Meningkatnya Kualitas<br>Kawasan Permukiman             | Persentase kawasan<br>permukiman rawan kumuh          | Luas kawasan permukiman<br>rawan kumuh _____ x 100 %<br><br>Luas kawasan permukiman | Bidang Kawasan<br>Permukiman | Data Bidang<br>Kawasan<br>Permukiman                  |
| 2  | Meningkatnya pemenuhan<br>kebutuhan perumahan<br>rakyat | Persentase pemenuhan<br>kebutuhan perumahan<br>rakyat | Jumlah rumah yang ada _____ x 100 %<br><br>Jumlah kebutuhan rumah                   | Bidang Perumahan             | - Data Bidang<br>Perumahan<br>- Data UPTD<br>Rusunawa |

## 18. IKU DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

### INSTANSI

: DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

### TUGAS POKOK

: Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan

### FUNGSI

- : 1. Perumusan kebijakan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
5. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
6. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
7. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
8. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik (SPP) dan standar operasional prosedur (SOP);
9. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP);
10. Pelaksanaan pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
11. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
12. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan dinas perdagangan dan perindustrian secara berkala melalui *sub domain website* pemerintah daerah;
13. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dinas perdagangan dan perindustrian; dan
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya .



| NO | KINERJA UTAMA/TUJUAN/<br>SASARAN STRATEGIS    | INDIKATOR KINERJA<br>UTAMA                         | PENJELASAN / FORMULASI<br>PENGHITUNGAN                                                                                                                                          | PENANGGUNG<br>JAWAB                                   | SUMBER<br>DATA             |
|----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1  | Meningkatnya pertumbuhan<br>usaha perdagangan | Persentase peningkatan<br>jumlah usaha perdagangan | $\{( \text{Jumlah unit usaha perdagangan tahun } n - \text{Jumlah unit usaha perdagangan tahun } (n-1) ) / \text{Jumlah unit usaha perdagangan tahun } (n-1) \} \times 100 \%$  | Bidang Pengembangan<br>Perdagangan dan<br>Pasar       | Disperdagin Kota<br>Blitar |
| 2  | Meningkatnya Pengawasan<br>Alat UTTP          | Persentase jumlah alat<br>UTTP bertanda tera sah   | $( \text{Jumlah alat UTTP bertanda tera sah} / \text{Jumlah alat UTTP yang ada} ) \times 100 \%$                                                                                | Bidang Pengawasan<br>Perdagangan dan<br>Perindustrian | Disperdagin Kota<br>Blitar |
| 3  | Meningkatnya produktivitas<br>industri        | Persentase peningkatan<br>nilai produksi industri  | $(( \text{Jumlah nilai produksi industri tahun } n - \text{Jumlah nilai produksi industri tahun } (n-1) ) / \text{Jumlah nilai produksi industri tahun } (n-1) ) \times 100 \%$ | Bidang Pengawasan<br>Perdagangan dan<br>Perindustrian | Disperdagin Kota<br>Blitar |

## 19. IKU DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

### INSTANSI

: DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

### TUGAS POKOK

: Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan

### FUNGSI

- : 1. Perumusan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro ;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi dan usaha mikro;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang koperasi dan usaha mikro;
5. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan pengelolaan anggaran, perlengkapan dan humasan;
6. Melaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
7. Menetapkan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam satu (1) kota;
8. Menetapkan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasinsimpan pinjam untuk mkoperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kota;
9. Menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam kota;
10. Menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam kota;
11. Menetapkan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam kota;
12. Mengkoordinasikan pemberdayaan usaha mikro kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan;
13. Mengoordinasikan pengembangan usaha mikro kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro kecil menjadi usaha kecil;



14. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
15. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik (SPP) dan standar operasional prosedur (SOP);
16. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP);
17. Pelaksanaan pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan atau / pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
18. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
19. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang koperasi dan usaha mikro secara berkala melalui *sub domain website* pemerintah daerah;
20. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang koperasi dan usaha mikro; dan
21. Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh walikota terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

| NO | KINERJA UTAMA/TUJUAN/<br>SASARAN STRATEGIS                                            | INDIKATOR KINERJA<br>UTAMA                                       | PENJELASAN / FORMULASI<br>PENGHITUNGAN                                                                                                     | PENANGGUNG<br>JAWAB                   | SUMBER<br>DATA                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1  | Meningkatnya Kontribusi<br>Usaha Mikro terhadap<br>Perekonomian                       | Persentase Peningkatan<br>kontribusi PDRB Usaha<br>Mikro         | [(Nilai PDRB sektor Usaha Mikro th n -<br>Nilai PDRB sektor Usaha Mikro th n-1) /<br>Nilai PDRB sektor Usaha Mikro th n-1] x<br>100 %      | Bidang<br>Pemberdayaan<br>Usaha Mikro | Data BPS dan<br>Blitar Kota<br>dalam Angka |
| 2  | Meningkatnya Kualitas<br>Kelembagaan dan<br>Produktifitas Koperasi dan<br>Usaha Mikro | Persentase Peningkatan<br>Pertumbuhan Usaha Mikro<br>yang dibina | [(Jumlah Usaha Mikro yang dibina th n -<br>Jumlah Usaha Mikro yang di bina th n-<br>1)/(Jumlah Usaha Mikro yang dibina th<br>n-1)] x 100 % | Bidang<br>Pemberdayaan<br>Usaha Mikro | Data Usaha<br>Mikro                        |

| NO | KINERJA UTAMA/TUJUAN/<br>SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA<br>UTAMA                                                                                                                                                                                                                                                          | PENJELASAN / FORMULASI<br>PENGHITUNGAN                                                           | PENANGGUNG<br>JAWAB                         | SUMBER<br>DATA                    |
|----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|    |                                            | <p>Persentase Koperasi sehat</p> <p>catatan :</p> <p>definisi koperasi sehat adalah koperasi yang memiliki skor <math>\geq 66.00</math> untuk penilaian aspek permodalan, kualitas aktiva produksi aktif, manajemen, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan jati diri koperasi</p> | $\left[ \frac{\text{Jumlah Koperasi sehat}}{\text{Jumlah Koperasi aktif}} \right] \times 100 \%$ | <p>Bidang<br/>Pemberdayaan<br/>Koperasi</p> | <p>Data Keragaan<br/>Koperasi</p> |



## **20. IKU DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**

### **INSTANSI**

**: DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**

### **TUGAS POKOK**

**: Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Ketahanan Pangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan**

### **FUNGSI**

- : 1. Perumusan kebijakan teknis urusan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan**
- 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan**
- 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan**
- 4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan**
- 5. Pengkajian pemberian izin serta pencabutan izin bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan**
- 6. Pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)**
- 7. Peremajaan data dalam bidang ketahanan pangan, bidang pertanian serta bidang kelautan dan perikanan untuk tingkat kota**
- 8. Koordinasi penyediaan infrastuktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, pengankaragaman konsumsi dan keamanan pangan**
- 9. Pengembangan sarana prasarana pertanian**
- 10. Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak**
- 11. Pembinaan produksi di bidang pertanian**

12. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan
13. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian
14. Pelaksanaan penyuluhan pertanian
15. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, katatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan
16. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja
17. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor
18. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
19. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
20. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan
21. Pengelolaan pengaduan masyarakat
22. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah
23. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian
24. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya



| NO | KINERJA UTAMA/TUJUAN/<br>SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA<br>UTAMA                            | PENJELASAN / FORMULASI<br>PENGHITUNGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PENANGGUNG<br>JAWAB                                                                                                    | SUMBER<br>DATA                                                 |
|----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1  | Meningkatnya ketahanan pangan daerah       | 1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan | Nilai skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan adalah komposisi kelompok pangan utama yang bila tersedia dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Semakin tinggi skor PPH Ketersediaan maka ketersediaan pangan semakin beragam, bergizi, seimbang dan aman. Skor PPH Ideal = 100 (Permentan 65 Tahun 2010 tentang SPM) | - Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan<br>- Bidang Peternakan<br>- Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Penyuluhan | Laporan Neraca Bahan Makanan & Pola Pangan Harapan (NBM & PPH) |
|    |                                            | 2. Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi                  | Nilai skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi adalah komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya Semakin tinggi skor PPH Konsumsi maka konsumsi pangan semakin beragam, bergizi, seimbang dan aman. Skor PPH Ideal = 100 (Permentan 65 Tahun 2010 tentang SPM)            | - Bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan<br>- Bidang Peternakan<br>- Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Penyuluhan | Laporan Analisis Konsumsi Pangan                               |

## 21. IKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP

INSTANSI : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan

FUNGSI

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang – undangan
2. Pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup
3. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup
4. Pengkoordinasian penyelenggaraan lingkungan hidup
5. Pengkoordinasi penyelenggaraan peningkatan kuantitas dan kualitas lingkungan hidup
6. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kebersihan kota
7. Pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)
8. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga dinas
9. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas
10. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasaranan kerja
11. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor
12. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
13. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
14. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan
15. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup



16. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang lingkungan hidup secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah
17. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang lingkungan hidup dan
18. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya

| NO | KINERJA UTAMA/TUJUAN/<br>SASARAN STRATEGIS                                           | INDIKATOR KINERJA<br>UTAMA            | PENJELASAN / FORMULASI<br>PENGHITUNGAN                                   | PENANGGUNG<br>JAWAB                         | SUMBER<br>DATA                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| 1  | Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam | Indeks Pencemaran Air                 | Kalkulator IPA                                                           | Bidang Penataan dan Pengendalian Lingkungan | Data hasil sampling badan air    |
|    |                                                                                      | Indeks Pencemaran Udara               | Kalkulator IPU                                                           | Bidang Penataan dan Pengendalian Lingkungan | Data hasil sampling udara ambien |
|    |                                                                                      | Indeks Tutupan Vegetasi               | Kalkulator ITV                                                           | Bidang Konservasi dan Komunikasi Lingkungan | Data luas RTH                    |
|    |                                                                                      | Nilai emisi GRK                       | Kalkulator emisi GRK                                                     | Bidang Konservasi dan Komunikasi Lingkungan | Data monev emisi GRK             |
|    |                                                                                      | Prosentase mata air yang berfungsi    | (Jumlah sumber mata air yang berfungsi / jumlah sumber mata air) x 100 % | Bidang Konservasi dan Komunikasi Lingkungan | Data pemantauan mata air         |
|    |                                                                                      | Predikat Pengelolaan Lingkungan Hidup | -                                                                        | Bidang Konservasi dan Komunikasi Lingkungan | Laporan Adipura                  |

| NO | KINERJA UTAMA/TUJUAN/<br>SASARAN STRATEGIS                                             | INDIKATOR KINERJA<br>UTAMA                          | PENJELASAN / FORMULASI<br>PENGHITUNGAN                                         | PENANGGUNG<br>JAWAB                         | SUMBER<br>DATA                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| 2  | Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan sanitasi sektor air limbah dan sampah | Prosentase rumah tangga yang terlayani IPAL komunal | (Jumlah rumah tangga yang terlayani IPAL komunal/ Jumlah rumah tangga) x 100 % | Bidang Penataan dan Pengendalian Lingkungan | Data pemantauan IPAL Komunal             |
|    |                                                                                        | Prosentase capaian layanan persampahan perkotaan    | (Volume sampah yang diolah / Volume sampah total) x 100 %                      | Bidang Pengelolaan Persampahan              | Data penimbangan TPA dan survey lapangan |



## **22. IKU DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

### **INSTANSI**

: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

### **TUGAS POKOK**

: Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan

### **FUNGSI**

- : 1. Perumusan Kebijakan di bidang P3A P2 & KB
2. Pelaksanaan Kebijakan di bidang P3A P2 & KB
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang P3A P2 & KB
4. Pelaksanaan Administrasi dinas di bidang P3A P2 & KB
5. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang P3A P2 & KB
6. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana dan prasarana kerja
7. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor
8. Penyusunan dan pelaksanaan Standar pelayanan publik dan Standart Operasional Prosedur
9. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
10. Pelaksanaan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan / atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan
11. Pengelolaan pengaduan masyarakat
12. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas P3A P2 & KB secara berkala melalui Sub Domain Website Pemerintah Daerah
13. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas P3A P2 & KB
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

| NO | KINERJA UTAMA/TUJUAN/<br>SASARAN STRATEGIS                      | INDIKATOR KINERJA<br>UTAMA                                          | PENJELASAN / FORMULASI<br>PENGHITUNGAN                                                                                                                                                 | PENANGGUNG<br>JAWAB | SUMBER<br>DATA            |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 1  | Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan            | Persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan                  | Jumlah Perempuan yang terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan dibagi jumlah wanita usia 17 - 60 tahun di Kota Blitar dikalikan 100 %                                                    | Bidang PP dan KK    | DP3A P2 & KB              |
| 2  | Menurunnya rata - rata Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Blitar | Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)                                     | $r = \{(P_1/P_2)^{(1/t)-1}\} \times 100$ $r = LPP$ $Pt = \text{Penduduk Tahun Sekarang}$ $P0 = \text{Penduduk tahun sebelumnya}$ $t = \text{selisih tahun sekarang dengan sebelumnya}$ | Bidang PP & KB      | BPS                       |
| 3  | Terselesaikannya Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak    | Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan / jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan x 100%                                       | Bidang PPA          | DP3A P2 & KB dan Polresta |



### 23. IKU DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

INSTANSI : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan

FUNGSI

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perpustakaan dan kearsipan;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perpustakaan dan kearsipan;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan dan kearsipan;
5. Pengkajian dan pengembangan sistem perpustakaan dan kearsipan;
6. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga/dinas/instansi terkait bidang perpustakaan dan kearsipan;
7. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan;
8. Pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Kearsipan dan pembentukan Jaringan Informasi Kearsipan;
9. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas;
10. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
11. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan dinas;
12. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP);
13. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodic yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;

14. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan;
15. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan public secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
16. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
17. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan dan kearsipan;
18. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

| NO | KINERJA UTAMA/TUJUAN/<br>SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA<br>UTAMA                                             | PENJELASAN / FORMULASI<br>PENGHITUNGAN | PENANGGUNG<br>JAWAB | SUMBER<br>DATA                       |
|----|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 1  | Meningkatnya minat baca masyarakat           | Indeks Minat Baca                                                      | Hasil Survey Indeks Minat Baca         | Bidang Perpustakaan | Hasil Minat Baca Provinsi Jawa Timur |
| 2  | Meningkatnya kualitas pelayanan arsip daerah | Nilai SKM pengguna pelayanan arsip terhadap kearsipan pelayanan daerah | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat       | Bidang Kearsipan    | Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat   |



## **24. IKU DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

### **INSTANSI**

: DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

### **TUGAS POKOK**

: Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan bidang tenaga Kerja serta pelayanan perizinan kepada masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

### **FUNGSI**

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan bidang tenaga kerja serta pelayanan perizinan kepada masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penanaman modal dan bidang tenaga kerja serta pelayanan perizinan kepada masyarakat.
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan bidang penanaman modal, dan bidang tenaga kerja serta pelayanan perizinan kepada masyarakat.
4. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal, bidang tenaga kerja serta pelayanan perizinan kepada masyarakat.
5. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga dinas.
6. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas.
7. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor.
8. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
9. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
10. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan /atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodic yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan.
11. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanaman modal dan bidang tenaga kerja serta pelayanan perizinan kepada masyarakat.

- 12. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang penanaman modal dan bidang tenaga kerja serta pelayanan perizinan kepada masyarakat secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah.
- 13. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang penanaman modal dan bidang tenaga kerja serta pelayanan perizinan kepada masyarakat.
- 14. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai bidang tugasnya.

| NO | KINERJA UTAMA/TUJUAN/<br>SASARAN STRATEGIS                           | INDIKATOR KINERJA<br>UTAMA                              | PENJELASAN / FORMULASI<br>PENGHITUNGAN                                             | PENANGGUNG<br>JAWAB    | SUMBER<br>DATA             |
|----|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1  | Meningkatnya investasi daerah                                        | Nilai investasi (milyar rupiah)                         | Jumlah nilai investasi                                                             | Bidang Penanaman Modal | Data BPS                   |
| 2  | Meningkatnya jumlah penyerapan tenaga kerja                          | Persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor formal   | Jumlah tenaga kerja di sektor formal/jumlah tenaga kerja yang ditempatkan x 100%   | Bidang Ketenagakerjaan | Data Register Tenaga Kerja |
|    |                                                                      | Persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor informal | Jumlah tenaga kerja di sektor informal/jumlah tenaga kerja yang ditempatkan x 100% | Bidang Ketenagakerjaan | Data Register Tenaga Kerja |
| 3  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan perijinan | Survey Masyarakat Kepuasan (SKM) Pelayanan Perijinan    | Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)                                             | Bidang Perizinan       | Nilai hasil SKM            |



## 25. IKU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

### INSTANSI

: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

### TUGAS POKOK

: Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan

### FUNGSI

1. Perumusan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ;
5. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah, peraturan walikota, keputusan walikota, penyelenggaraan keteriban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat ;
6. Pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan / atau aparaturnya ;
7. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan menaati penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota ;
8. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan ;
9. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja ;
10. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor ;
11. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik ( SPP ) dan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) ;

12. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP ) ;
13. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) dan / atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan ;
14. Pengelolaan pengaduan masyarakat ;
15. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Satuan Polisi Pamong Praja secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah ;
16. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja ; dan
17. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

| NO | KINERJA UTAMA/TUJUAN/<br>SASARAN STRATEGIS                                                                                | INDIKATOR KINERJA<br>UTAMA                                           | PENJELASAN / FORMULASI<br>PENGHITUNGAN                                                                                                                                                             | PENANGGUNG<br>JAWAB                           | SUMBER<br>DATA                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1  | Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang tertib                                                                        | Persentase penurunan jumlah pelanggaran perda                        | Jumlah pelanggaran perda tahun ke (n-1)- Jumlah pelanggaran perda tahun ke n / Jumlah pelanggaran perda tahun ke n-1 x 100 %                                                                       | Bidang Pengakan Peraturan Perundangan Daerah  | Laporan pelanggaran Perda                        |
| 2  | Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi perlindungan masyarakat | Persentase penurunan jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum | Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke (n-1) - Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke n / Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke n-1 x 100 % | Bidang Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat | Laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum |
|    |                                                                                                                           | Rasio petugas perlindungan masyarakat di Kabupaten / Kota            | ( Jumlah satuan linmas dalam satu kabupaten/kota ) / (Jumlah RT atau sebutan lainnya dalam satu kabupaten/kota )                                                                                   | Bidang Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat | Data petugas perlindungan masyarakat             |



| NO | KINERJA UTAMA/TUJUAN/<br>SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA<br>UTAMA                                                 | PENJELASAN / FORMULASI<br>PENGHITUNGAN                                                                                                 | PENANGGUNG<br>JAWAB      | SUMBER<br>DATA                |
|----|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 3  | Meningkatnya penanganan<br>bahaya kebakaran | Persentase respon<br>penanggulangan kebakaran<br>yang sesuai SOP, SPP, SPM | Jumlah kasus kebakaran di WMK yang<br>tertangani dalam tingkat waktu<br>tanggap / jumlah kasus kebakaran<br>dalam jangkuan WMK x 100 % | UPT Pemadam<br>Kebakaran | Laporan kejadian<br>kebakaran |

26. IKU RSUD MARDI WALUYO

INSTANSI : RSUD MARDI WALUYO

TUGAS POKOK : Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pelayanan Kesehatan Paripurna

FUNGSI : 1. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;

2. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat II sesuai kebutuhan medis;

3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;

4. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan ;

5. pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan;

6. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan kesehatan;

7. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga RSUD;

8. penyelenggaraan tugas pelayanan medis dan penunjang medis, keperawatan serta pengendalian dan pelaporan ;

| NO | KINERJA UTAMA/TUJUAN/<br>SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR<br>KINERJA UTAMA                             | PENJELASAN / FORMULASI<br>PENGHITUNGAN                                                                                                                                                                                                                   | PENANGGUNG<br>JAWAB     | SUMBER DATA            |
|----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1  | Meningkatnya pelayanan masyarakat          | Indeks Masyarakat terhadap pelayanan RSUD Mardi Waluyo | Nilai rata-rata IKM Rumah Sakit<br>IKM merupakan nilai rata-rata hasil penilaian pelanggan RS terhadap pelayanan yang diterimanya baik kualitas pelayanan dan performance petugas dari berbagai jenis pelayanan kesehatan yang dilakukan di rumah sakit. | Wadir Umum dan Keuangan | Nilai hasil survey IKM |



| NO | KINERJA UTAMA/TUJUAN/<br>SASARAN STRATEGIS         | INDIKATOR<br>KINERJA UTAMA                                                | PENJELASAN / FORMULASI<br>PENGHITUNGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PENANGGUNG<br>JAWAB                    | SUMBER DATA     |
|----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| 2  | Meningkatnya Pencapaian SPM Pelayanan Kesehatan RS | Percentase indikator Standar Minimal (SPM) pelayanan yang mencapai target | <p>Indikator ini menggambarkan tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan rumah sakit yang diterimanya. Semakin tinggi nilai IKM menggambarkan semakin tinggi kepuasan pelanggan terhadap pelayanan rumah sakit.</p> <p>Jumlah indikator SPM RS yang mencapai target <math>\frac{\text{Jumlah indikator SPM RS yang mencapai target}}{\text{Jumlah seluruh indikator SPM RS}} \times 100\%</math></p> <p>Standar pelayanan minimal rumah sakit merupakan indikator pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh rumah sakit. Target pencapaiannya disesuaikan dengan kemampuan sumber daya rumah sakit yang tersedia dan harus dicapai secara bertahap sehingga pada periode tertentu harus tercapai sesuai target yang ditetapkan oleh menteri Kesehatan RI.</p> <p>Indikator ini menggambarkan kemampuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan berkualitas.</p> | Wadir dan Medis<br>Pelayanan Penunjang | Laporan Tahunan |
|    |                                                    | Bed Occupancy Rate (BOR)                                                  | <p>Jumlah hari perawatan RS dalam waktu tertentu <math>\frac{\text{Jumlah hari perawatan RS dalam waktu tertentu}}{\text{Jumlah tempat tidur} \times \text{Jumlah hari dalam satu satuan waktu}} \times 100\%</math></p> <p>BOR merupakan suatu persentase pemakaian tempat tidur pada suatu waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tentang tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Nilai ideal parameter ini adalah 60% - 85%.</p> <p>Nilai BOR</p> <p>&lt;60% = 75%</p> <p>60%-85% = 100 %</p> <p>&gt;85% = 75 %</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wadir dan Medis<br>Pelayanan Penunjang | Rekam Medik     |

| NO | KINERJA UTAMA/TUJUAN/<br>SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR<br>KINERJA UTAMA       | PENJELASAN / FORMULASI<br>PENGHITUNGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PENANGGUNG<br>JAWAB                    | SUMBER DATA |
|----|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
|    |                                            | Average Length of Stay<br>(ALOS) | $\frac{\text{Jumlah hari perawatan pasien keluar RS}}{\text{Jumlah pasien keluar RS (hidup + mati)}} \times 100\%$ <p>ALOS merupakan rata-rata lama rawatan seorang pasien. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi juga dapat memberikan gambaran tentang mutu pelayanan. Secara umum ALOS yang ideal antara 6 hari – 9 hari.</p> <p>Nilai ALOS</p> <p>&lt;6 hari = 75%</p> <p>6-9 hari = 100%</p> <p>&gt;9 hari = 75%</p>                                                                   | Wadir dan Medis<br>Pelayanan Penunjang | Rekam Medik |
|    |                                            |                                  | <p>Turn Over Internal (TOI)</p> $\frac{\text{Jumlah tempat tidur x hari} - \text{hari perawatan RS}}{\text{Jumlah pasien keluar RS (hidup + mati)}}$ <p>TOI merupakan rata-rata hari tempat tidur yang tidak ditempati dari saat terisi sampai saat terisi berikutnya. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi dari pemakaian tempat tidur. Idealnya tempat tidur kosong hanya dalam waktu 1 hari – 3 hari.</p> <p>Nilai TOI</p> <p>&lt;1 hari = 75%</p> <p>1-3 hari = 100%</p> <p>&gt;3 hari = 75%</p> | Wadir dan Medis<br>Pelayanan Penunjang | Rekam Medik |
|    |                                            | Bed Turn Over (BTO)              | $\frac{\text{Jumlah pasien keluar RS (hidup + mati)}}{\text{Jumlah tempat tidur}}$ <p>BTO merupakan frekwensi pemakaian tempat tidur berapa kali dalam satu satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wadir dan Medis<br>Pelayanan Penunjang | Rekam Medik |



| NO | KINERJA UTAMA/TUJUAN/<br>SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR<br>KINERJA UTAMA | PENJELASAN / FORMULASI<br>PENGHITUNGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PENANGGUNG<br>JAWAB                 | SUMBER DATA |
|----|--------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
|    |                                            |                            | gambaran tingkat efisiensi dari pemakaian tempat tidur. Idealnya tempat tidur rata-rata dipakai selama 1 tahun sebanyak 40 kali – 50 kali.<br>Nilai BTO<br><40 kali = 75%<br>40-50 kali = 100%<br>>50 kali = 75%                                                                                                                                                                              |                                     |             |
|    |                                            | Net Death Rate (NDR)       | $\frac{\text{Jumlah pasien keluar mati} \geq 48 \text{ jam}}{\text{Jumlah pasien keluar RS (hidup + mati)}} \times 10000\%$ <p>NDR adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. Indikator ini dapat memberikan gambaran mutu pelayanan rumah sakit. NDR yang dapat ditolerir adalah kurang dari 25 orang yang mati per 1000 pasien yang keluar RS.</p> | Wadir dan Pelayanan Penunjang Medis | Rekam Medik |
|    |                                            | Gross Death Rate (GDR)     | $\frac{\text{Jumlah pasien keluar mati}}{\text{Jumlah pasien keluar RS (hidup + mati)}} \times 10000\%$ <p>GDR adalah angka kematian umum untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. Indikator ini dapat memberikan gambaran mutu pelayanan rumah sakit. Nilai GDR sebaiknya tidak lebih dari 45 orang yang mati per 1000 penderita keluar RS.</p>                                                | Wadir dan Pelayanan Penunjang Medis | Rekam Medik |

## 27. IKU KECAMATAN

### INSTANSI

: KECAMATAN

### TUGAS POKOK

- : 1. Menyelenggarakan tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum ;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan peraturan Walikota ;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan ;

7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan ;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Blitar yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan kota Blitar yang ada di kecamatan ;
9. Melaksanakan tugas yang di limpahkan oleh walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Blitar.

### FUNGSI

- : 1. Perumusan dan penjabaran kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan kecamatan;
2. Pengkoordinasian operasional program-program pemerintah di wilayah kerjanya;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan kelurahan;
4. Penyelenggaraan pelayanan umum terpadu kecamatan;
5. Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pelayanan kependudukan sesuai peraturan perundangan;
6. Pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
7. Penyelenggaraan dan pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial;



8. Pengendalian dan pengawasan kegiatan pemerintahan serta penyelenggaraan tugas tampung tantra di wilayah kerjanya;
9. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga kecamatan;
10. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan dan humasan;
11. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana dan prasarana kerja;
12. Penyelenggaraan keamanan dan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
13. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik (SPP) dan standar operasional prosedur (SOP);
14. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP);
15. pelaksanaan pengukuran indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
16. pengelolaan pengaduan masyarakat;
17. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait Kecamatan secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
18. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Kecamatan; dan
19. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

| NO | KINERJA UTAMA/TUJUAN/<br>SASARAN STRATEGIS                           | INDIKATOR KINERJA<br>UTAMA  | PENJELASAN / FORMULASI<br>PENGHITUNGAN | PENANGGUNG<br>JAWAB | SUMBER<br>DATA      |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan kecamatan | Survey Masyarakat Kecamatan | Kepuasan (SKM)                         | Nilai SKM/IKM       | Kasi Pelayanan Umum |
|    |                                                                      |                             |                                        |                     | Hasil SKM           |

| NO | KINERJA UTAMA/TUJUAN/<br>SASARAN STRATEGIS                                | INDIKATOR KINERJA<br>UTAMA                                                                                                                 | PENJELASAN / FORMULASI<br>PENGHITUNGAN                                                                    | PENANGGUNG<br>JAWAB                                                                                                  | SUMBER<br>DATA                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 2  | Meningkatnya koordinasi di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah | Persentase jumlah koordinasi di bidang pemerintahan/keamanan/keterlibatan/kesejahteraan sosial/pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti | (Jumlah koordinasi/pembinaan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh koordinasi/pembinaan) dikali 100% | - Kasi Pemerintahan dan Tranribum<br>- Kasi Perekonomian dan Kesra<br>- Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan | Hasil Rapat Koordinasi yang dilaksanakan |

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
ORGANISASI,

  
Juari  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19651204 198603 1 006